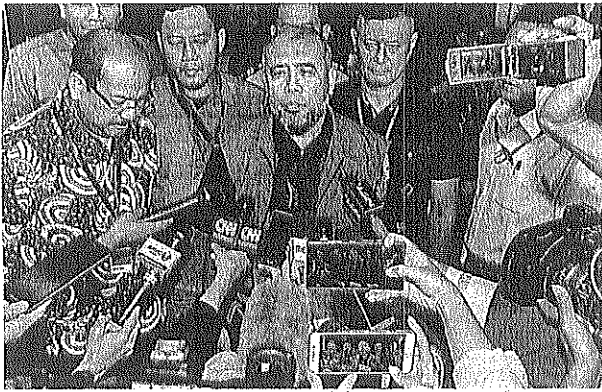


PERPANJANG MASA TAHANAN



Mantan Hakim MK Patrialis Akbar (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/2). Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang 40 hari masa tahanan para tersangka kasus suap hakim MK terkait dengan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PERSAINGAN TIDAK SEHAT

KPPU Investigasi Sektor Farmasi

JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang melakukan investigasi di sektor industri farmasi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Gopra Panjaitan, Direktur Penindakan KPPU, mengaku pihaknya sedang melakukan investigasi di sektor farmasi. Selain sektor pangan, sektor kesehatan juga menjadi fokus komisi dalam penegakan persaingan sehat.

"Sektor farmasi juga kami awasi ketat, karena sangat berpengaruh pada hayat hidup orang banyak. Ini investigasi inisiatif dari komisi," katanya kepada *Bisnis*, Selasa (14/2).

Menurutnya, untuk investigasi berdasarkan laporan lebih condong ke arah persaingan tender. Namun, untuk sektor strategis yang berpengaruh pada hayat hidup orang banyak, inisiatif dari Komisi.

KPPU juga mendorong transparansi persaingan sektor kesehatan dengan menggandeng Kementerian Kesehatan sekaligus fokus pengawasan industri.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengungkapkan setidaknya ada tiga poin penting dalam upaya meningkatkan persaingan sehat di sektor kesehatan. Pertama, soal harga obat yang tinggi, keterbukaan informasi produk farmasi,

serta ketimpangan harga produk farmasi.

Pekan lalu, KPPU bersepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Bidang Kesehatan.

"Tentu kami akan melihat dari persaingan usahanya, Kementerian Kesehatan lihat dari regulasinya. Pengawasan tidak sekadar pada produk yang masuk [e-catalog] Jaminan Kesehatan Nasional, tetapi keseluruhan."

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi harmonisasi dan koordinasi kebijakan persaingan usaha, sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan peraturan bidang kesehatan, dan pemberian bantuan narasumber dan/atau ahli.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan. Syarkawi mengamati ada beberapa produk farmasi yang relatif tinggi untuk jenis tertentu. Selain itu, soal ketimpangan harga produk paten, generik bermerek dan generik.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi Darudjatun Sanusi mengatakan saat ini sulit jika industri farmasi melakukan praktik monopoli, khususnya untuk memenuhi produk JKN. (David Eka Issetlabudi)

SENGKETA UTANG PIUTANG

Asia Paper Masuk PKPU Sementara

JAKARTA — PT Asia Paper Mills harus segera menyusun rencana perdamaian setelah pengadilan niaga mengabulkan permohonan PKPU sementara yang diajukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Deliana Pradhita Sari
deliana.pradhitasari@bisnis.com

Asia Paper Mills (termohon) terbukti memiliki utang kepada Bank Mandiri (pemohon) senilai Rp387,44 miliar, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. "Mengadili, mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Abdul Kohar, Selasa (14/2).

Dengan begitu, produsen kemasan kertas dan karton tersebut harus merestrukturisasi utangnya melalui penawaran rencana perdamaian. Perkara ini didaftarkan dengan No.11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt. Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menurut majelis, permohonan mengakui atau tidak membantah jika memiliki pinjaman sesuai yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya. Namun, pemohon tidak memerinci kapan waktu jatuh tempo masing-masing pinjaman. Alhasil, majelis memutuskan jatuh tempo seluruh utang yakni pada somasi atau teguran terakhir yaitu pada 31 Mei 2016.

Majelis juga menimbang adanya kreditur lain yang memiliki tagihan kepada pemohon. Salah satunya PT PLN (Persero) Distribusi Banten, dengan tunggakan biaya listrik Rp2 miliar.

Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), majelis hakim mengangkat Syahril Ridho, Hariyanto dan Nila Asriyanti selaku tim pengurus Asia Paper Mills. Masa PKPU sementara ditetapkan 45 hari setelah putusan diucapkan.

Kuasa hukum Bank Mandiri Tommi S. Siregar berujar putusan majelis hakim telah dipertimbangkan dengan baik. Dikabulkannya permohonan PKPU ini, katanya, merupakan proses yang baik bagi pemohon dan kreditor lainnya untuk mendapatkan kejelasan atas piutangnya.

- ▶ Asia Paper Mills terbukti memiliki utang kepada Bank Mandiri senilai Rp387,44 miliar.
- ▶ Majelis hakim mengangkat Syahril Ridho, Hariyanto dan Nila Asriyanti selaku tim pengurus.

"Putusan majelis hakim sangat mendetail. Kami puas karena dari kami dipertimbangkan dengan baik," tuturnya.

Di sisi lain, kuasa hukum PT Asia Paper Mills Priyono menyampaikan masih akan mempelajari isi putusan, meski sudah ditetapkan dalam masa PKPU. Dia belum bisa bicara banyak mengenai rencana perdamaian yang akan ditawarkan.

"Intinya kami agak berat dengan putusan ini karena jawaban yang kami ajukan tidak menjadi pertimbangan majelis," sebutnya.

Pericara ini bermula ketika bank berkode saham BMRI ini menyelurkan fasilitas kredit kepada termohon, yakni fasilitas kredit investasi 1 (KI-1), fasilitas kredit modal kerja (KMK), fasilitas kredit investasi 2 (KI-2) dan fasilitas kredit *import general facility* (IGF).

Masing-masing fasilitas kredit, mengatur tentang jumlah limit, metode angsuran pembayaran dan jatuh tempo pembayaran.

Berkas permohonan menyebutkan kendala diatur secara tegas mengenai cara dan jumlah pembayaran utang, termohon tidak membayar seluruh tunggakan kewajiban senilai Rp387,44 miliar per 23 Mei 2016. Dengan begitu, pemohon mengirimkan surat peringatan kepada termohon sebanyak tiga kali pada 11 April, 20 Mei dan 31 Mei 2016.

Dalam permohonannya kali ini, Bank Mandiri juga mengajukan empat kreditor lain. Mereka yakni PT Sadikun Niagamas

Raya, PT Cahaya Telaga Mas, PT Prospek Chemical Indonesia, dan PT PLN (Persero) Distribusi Banten.

UNITED COLOUR

Sementara itu, dalam perkara PKPU yang lain, perusahaan tekstil PT United Colour Indonesia menolak permohonan restrukturisasi yang diajukan PT Warna Jaya Sentosa. Alasannya, dalil yang diajukan Warna Jaya (pemohon) dianggap tidak masuk akal.

Kuasa hukum United Colour Indonesia Pringgo dari kantor hukum Kresna & Associates mengatakan pihaknya menolak dengan tegas dan tidak mengakui adanya utang kepada pemohon PKPU sebesar Rp3,53 miliar.

"Kami membantah atas tagihan pemohon senilai Rp3,53 miliar dalam permohonan PKPU ini," katanya usai persidangan dengan agenda jawaban, Selasa (14/2).

Menurut dia, tagihan yang dibebankan kepada kliennya tidak masuk akal. Pasalnya, pemohon membebankan biaya pihak ketiga dalam akumulasi utang yang ditagih kepada United Colour (termohon).

Pringgo menjelaskan, tagihan atas pemesanan barang oleh United Colour kepada Wana Jaya hanya Rp2,97 miliar. Namun pemohon membebankan tagihan biaya bunga bank, atas pinjamannya kepada pihak ketiga senilai Rp567,6 juta.

Selain itu, dia mengklaim United Colour telah melakukan pembayaran Rp197 juta atas utang Rp2,96 miliar. Namun, pembayaran itu tidak dimasukkan dalam permohonan PKPU. Dengan begitu, dia menilai permohonan PKPU tidak sederhana.

Pemohon PKPU PT Warna Jaya Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang berupa obat celup tekstil, mesin dan alat teknik. Pemohon berkedudukan di Cidadak, Bandung.

Sementara itu, PT United Colour Indonesia (termohon) merupakan perusahaan tekstil yang beralamat di Cimahi Selatan, Jawa Barat.

Kuasa hukum PT Warna Jaya Sentosa Dedy Darmawan mengatakan permohonan PKPU dilayangkan agar termohon merestrukturisasi utangnya. Pemohon juga menyertakan dua kreditor lain yakni PT Laju Sakti Jaya dan CV Sumber Sari Indah. ☐



LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. DAN ENTITAS ANAK

Jl. Raya Jatiwaringin no. 54, Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi - 17411
Phone : (021) 84973363 (huriting) Fax : (021) 84973391, 84973392
Email : sekper@wika-beton.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN			
Untuk Periode 12 (Dua Belas) bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Duauluh) (Dinyalakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				Untuk Periode 12 (Dua Belas) bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Duauluh) (Dinyalakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				Untuk Periode 12 (Dua Belas) bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Duauluh) (Dinyalakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
ASET	31 Desember 2016	31 Desember 2015		2016	2015		2016	2015		2016	2015
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK			PENDAPATAN USAHA			ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kas dan Setara Kas	342.211.216,83	823.639.656,915	Piutang Jangka Pendek	349.740.076,706	131.491.081,339	3.461.731.006,128	2.657.622.140,207	Penerimaan Kas dari Pelanggan	3.191.777.692,575	2.808.410.000,322	
Piutang Usaha			Utang Usaha	616.352.291,463	579.477.314,623	(2.977.299.591,593)	(2.224.038.632,637)	Pembayaran Kepada Pemasok	(2.543.245.287,781)	(1.919.009.169,165)	
(Setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai piutang Rp 41.153.711.551 dan Rp 34.777.058.517 Per 31 Desember 2016 dan 2015)			Pihak Ketiga	47.773.175,612	28.009.650,530	504.432.044,516	328.533.248.476	Pembayaran Kepada Direksi dan Komisaris	(307.897.000,544)	(104.059.406,223)	
			Pihak Berelai	11.927.211,418	8.432.874,000	BERBAH USAHA			Pembayaran Pajak Penghasilan	(239.923.933,734)	(214.719.000,000)
			Utang Pajak	125.599.024,542	208.897.189,150	Ribun Umum dan Administrasi	(88.442.657,834)	(84.930.656,613)	Pembayaran Bunga	21.155.463,075	49.208.608,209
			Utang Mula dari Piutangan	12.599.024,542	208.897.189,150	Beban Pungutan	(4.669.056,558)	(3.032.251,330)	Pembayaran Bunga	(68.662.321,000)	(44.744.190,787)
			Pendapatan Utama Dimulai	12.599.024,542	208.897.189,150	Beban Pemasaran	(2.665.752,190)	(2.161.641,639)	Pembayaran Operasional Lainnya	(165.432.956,466)	(109.054.400,955)
			Beban Yang Masih Harus Dibayar	403.656.643,314	365.081.174,822	Jumlah Beban Usaha	(66.174.488,543)	(59.159.479,244)	Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk)	(39.247.536,511)	458.415.942,281
			Liabilitas Lain	9.516.989,737	37.575.514,658	LABA USAHA	406.256.155,533	238.437.769,129	Aktivitas Operasi		
			Rugian Jangka Pendek dari Utang Jangka Panjang:	120.000.000,000	60.000.000,000	PENDAPATAN (BEDA) LAIN-LAIN			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
			Piutangan Bank	5.883.791.637,442	1.793.464.704,244	Pendapatan Bunga	16.337.101,019	37.229.587,494	Perolehan Aset Tetap	(162.318.021,805)	(442.891.450,737)
			Liabilitas Sewa Penyediaan		1.174.732,559	Beban Bunga	(56.504.143,556)	(62.501.848,664)	Penyertaan pada anak perusahaan		(39.243.456,600)
			Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.883.791.637,442	1.793.464.704,244	Beban Penunjang Hal Piutang	(7.817.412,457)	(1.150.045,232)	Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk)	(162.318.021,805)	(442.891.450,737)
						Solusi Kori	(370.253,750)	(1.629.616,325)	Aktivitas Investasi		
						Beban PPN Final	(11.819.777,560)	(6.515.777,511)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
						Lain-lain Bersih	(7.909.517,808)	2.652.431.141	Pembayaran Piutang Bank	1.655.225.864,785	745.015.156,429
						Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(67.918.534,555)	(39.539.208,663)	Pembayaran Piutang Usaha	(326.016.909,489)	(613.001.204,024)
						LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	340.237.620,978	199.537.561,654	Pembayaran Piutang Tersusut/Kurasa Bank	(60.000.000,000)	400.000.000,000
						Beban Pajak Penghasilan	(58.691.974,802)	(37.749.539,254)	Pembayaran Pajak Penghasilan	(5.800.803,691)	(68.662.153,326)
						LABA TAHUN BERJALAN	281.545.646,176	161.788.022,370	Pembayaran Hutang Sewa Penyediaan	(1.174.732,551)	(1.237.458,547)
						PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			Pembayaran Bunga Sewa Penyediaan	1.200.690,050	824.156,500
						SETELAH PAJAK			Palusuran MTH		(356.000.650,000)
						Pengaruh yang Tidak Akan dieliminasi ke Laba Rugi	(3.520.002,002)	(13.216.644,333)	Pembayaran Dividen	(32.735.292,000)	(81.810.000,000)
						Kurangnya Aktiva dan Liabilitas Awal Periode			Kapitalisasi Non Pengendali	(19.462.519,343)	(39.748.716,631)
						Pengaruh yang Akan dieliminasi ke Laba Rugi			Kurangkan (Penurunan) dari Aktivitas		
						PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			Pendanaan Lainnya		
						SETELAH PAJAK	(5.120.002,002)	(13.216.644,333)	Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk)	82.215.906,692	(301.140.376,553)
						LABA KOMPREHENSIF	276.025.644,174	158.570.917,437	AKTIFITAS PENDANAAN		
						LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE:			KEHAKIMAN (PEHUNJUAN) BERSIH		
						- PEMILIK ENTITAS BERSIH	272.425.432,019	173.878.424,519	KAS DAN SETARA KAS	(481.419.652,136)	(214.843.832,853)
						- KEPENTINGAN NON PENGENDALI	3.141.155,200	(2.691.402,779)	AMPAK SELISIH RUIIS		
						JUMLAH	275.566.587,219	171.187.021,740	SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	623.600.868,816	1.018.474.658,874
						LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT			SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	302.212.211,631	818.016.656,815
						DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
						- PEMILIK ENTITAS BERSIH	269.905.369,167	161.662.380,211			
						- KEPENTINGAN NON PENGENDALI	5.141.155,200	(2.691.402,779)			
						JUMLAH	275.046.524,367	158.970.977,432			
						LABA BERSIH PER SAMPAH	31,80	19,85			
JUMLAH ASET	4.662.319.785,318	4.458.097.502,805	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4.662.319.785,318	4.458.097.502,805						

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN							
Untuk Periode 12 (Dua Belas) bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Duauluh) (Dinyalakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
	Modal Ditempatkan dan Diotor	Tambahan Modal Diotor	Rahasia Lebih Ditebuskan Pengembuatannya	Beban Disajikan Pengembuatannya	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Beban Diperoleh Kebutuhan	Jumlah Ekuitas
Saldo per 01 Januari 2015 disajikan kembali	871.546.650,000	973.193.708,603	51.319.409,332	331.657.058,617	(26.332.146,082)	(50.246.193,143)	2.143.137.443,327
Cad Tanah Ditetapkan Pengembuatannya	-	-	-	-	-	-	-
Penawaran Umum Perdana	-	-	-	-	-	-	-
Seluruh Modal Pada Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	-
Dana Cadangan Bertujuan	-	-	10.000.000,000	(10.000.000,000)	-	-	-
Dividen WKA	-	-	-	(61.810.959,600)	-	-	(61.810.959,600)
Dividen IKMS	-	-	-	(10.145.745,557)	-	-	(10.145.745,557)
Dividen Yayasan Wijaya Karya	-	-	-	(1.017.028,200)	-	-	(1.017.028,200)
Dividen Masyarakat	-	-	-	(25.592.944,414)	-	-	(25.592.944,414)
Keputusan Non Pengendali Akuisisi Anak Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Penyusutan Imbalan Pastu Kerja Laba Bersih Komprehensif	-	-	-	173.878.424,519	(13.216.044,333)	-	160.662.380,211
Saldo per 31 Desember 2015	871.546.650,000	973.193.708,603	61.319.409,332	296.976.022,935	(39.549.190,419)	(50.246.193,143)	2.205.241.015,308
Dana Cadangan Bertujuan	-	-	6.250.000,000	(6.250.000,000)	-	-	-
Seluruh Modal Pada Entitas Anak	-	-	-	(32.735.292,790)	-	-	(32.735.292,790)
Dividen WKA	-	-	-	(5.954.691,959)	-	-	(5.954.691,959)
Dividen IKMS	-	-	-	(538.629,160)	-	-	(538.629,160)
Dividen Yayasan Wijaya Karya	-	-	-	(12.365.168,194)	-	-	(12.365.168,194)
Dividen Masyarakat	-	-	-	272.425.432,019	(3.520.002,002)	-	268.905.369,167
Labas Bersih Komprehensif	-	-	-	691.955.242,881	(43.969.253,321)	-	647.985.989,560
Saldo per 31 Desember 2016	871.546.650,000	973.193.708,603	66.569.409,332	691.955.242,881	(43.969.253,321)	(50.246.193,143)	2.421.948.572,332

Catatan:
Informasi Laporan Keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugilarjo Adi & Rekan (Member of HLB International). Dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai Laporanannya per tanggal 10 Februari 2017 Nomor 016/LAI-WB/17/17.

Bekasi, 16 Februari 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
S.E. & O
Direksi

Entitas Anak:

